Bupati Bombana Hadiri Rakor Bioetanol, Pemerintah Siapkan Tebu, Singkong, dan Jagung sebagai Bahan Baku

Jakarta, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menghadiri rapat koordinasi Program Khusus Pemerintah untuk Bioetanol yang membahas kesiapan daerah dalam mendukung pengembangan energi berbasis komoditas pertanian. Rapat yang dipimpin Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman itu diikuti 44 bupati dari berbagai daerah dan berlangsung di Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan bioetanol dari sisi hulu, terutama kesiapan lahan dan ketersediaan komoditas pertanian yang dapat menjadi bahan baku. Pemerintah pusat mendorong daerah memetakan potensi wilayah masing-masing agar program pengembangan bioetanol dapat berjalan dengan dukungan bahan baku yang memadai.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan pengembangan bioetanol dalam skala besar. Tiga komoditas utama yang didorong sebagai sumber bahan baku adalah tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung.

“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Andi Amran Sulaiman dalam rapat tersebut.

Menurut Amran, kebutuhan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan industri bioetanol. Karena itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan lahan yang sesuai dengan karakteristik komoditas serta mendukung keberlanjutan produksi bahan baku.

Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan sumber energi alternatif. Pemerintah juga ingin memastikan pengembangan bioetanol memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani yang akan

terlibat dalam penyediaan bahan baku.

Pengembangan industri bioetanol berbasis pertanian membuka peluang untuk memperkuat hubungan antara sektor pertanian dan energi. Komoditas yang selama ini menjadi bagian dari kegiatan pertanian dapat dikembangkan sebagai bahan baku industri dengan nilai tambah yang lebih besar.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian juga mendorong pemerintah daerah untuk melihat potensi komoditas yang paling sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Pemetaan tersebut diperlukan agar pengembangan bahan baku tidak hanya berorientasi pada luas lahan, tetapi juga mempertimbangkan produktivitas dan keberlanjutan produksi.

Kesiapan lahan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pembahasan. Pemerintah daerah perlu memastikan lahan yang diproyeksikan untuk mendukung program memiliki status dan legalitas yang jelas serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain legalitas, kesesuaian lahan dengan komoditas juga menjadi pertimbangan. Setiap daerah memiliki karakteristik tanah, iklim, ketersediaan air, serta pola pertanian yang berbeda. Kondisi tersebut perlu diperhitungkan agar pengembangan bahan baku bioetanol dapat dilakukan secara realistis.

Kementerian Pertanian mendorong agar daerah melakukan identifikasi awal terhadap lahan dan komoditas yang berpotensi mendukung program. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk dukungan dan langkah pengembangan yang diperlukan.

Bagi Kabupaten Bombana, pembahasan tersebut menjadi informasi penting dalam melihat peluang pengembangan komoditas pertanian sebagai bagian dari program energi pemerintah. Potensi daerah perlu dipetakan terlebih dahulu untuk mengetahui komoditas yang paling memungkinkan dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol.

Kehadiran Bupati Bombana dalam rapat tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan industri berbasis sumber daya daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana memiliki sejumlah komoditas pertanian yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan program tersebut. Namun, kesiapan untuk masuk dalam program bioetanol membutuhkan kajian lebih lanjut, terutama terkait ketersediaan lahan, produktivitas, legalitas lahan, pola produksi, serta kesiapan petani.

Pengembangan bioetanol juga membutuhkan kesinambungan pasokan bahan baku. Industri tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan produksi dalam waktu tertentu. Karena itu, perencanaan budidaya dan pengelolaan produksi harus disusun secara terukur agar kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian juga menempatkan petani sebagai bagian penting dalam pengembangan program tersebut. Petani bukan hanya sebagai produsen komoditas, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok yang mendukung terbentuknya industri bioetanol.

Dengan keterlibatan petani, program diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi di tingkat daerah. Produksi pertanian dapat memperoleh pasar baru, sementara pengembangan industri dapat menciptakan aktivitas ekonomi tambahan di wilayah yang menjadi sentra bahan baku.

Namun, pengembangan tersebut tetap membutuhkan perencanaan yang matang. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengembangan komoditas untuk bahan baku bioetanol tidak mengganggu kebutuhan pangan masyarakat. Keseimbangan antara kepentingan pangan, energi, dan peningkatan pendapatan petani menjadi bagian penting dalam perencanaan program.

Tiga komoditas yang didorong pemerintah, yaitu tebu, singkong, dan jagung, memiliki karakteristik produksi yang berbeda. Karena itu, setiap daerah perlu menyesuaikan pengembangannya dengan kondisi wilayah dan potensi produksi yang tersedia.

Kesiapan infrastruktur juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan bioetanol. Ketersediaan jalan produksi, akses transportasi, sarana pertanian, fasilitas pascapanen, hingga konektivitas menuju lokasi pengolahan akan memengaruhi efisiensi rantai pasok.

Pembangunan industri bioetanol juga membutuhkan kepastian bahan baku dalam

jangka panjang. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani menjadi faktor penting dalam memastikan program tidak berhenti pada tahap perencanaan.

Rapat koordinasi yang dihadiri 44 bupati tersebut menjadi bagian dari langkah awal pemerintah pusat untuk menyamakan pemahaman mengenai arah pengembangan bioetanol. Pemerintah daerah diharapkan dapat mulai mengidentifikasi potensi masing-masing wilayah serta menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Bagi Bombana, peluang tersebut dapat dikaji melalui pemetaan komoditas pertanian yang memiliki potensi produksi dan dukungan lahan yang memadai. Hasil pemetaan nantinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan bentuk dukungan terhadap program bioetanol.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Informasi mengenai arah program menjadi bahan bagi daerah untuk melihat peluang pengembangan pertanian dan industri yang sesuai dengan potensi wilayah.

Pemerintah pusat sendiri menargetkan pengembangan bioetanol dilakukan secara masif dengan dukungan lahan dan komoditas strategis dari berbagai daerah. Pembangunan pabrik bioetanol direncanakan berjalan seiring dengan kesiapan bahan baku dari wilayah penghasil.

Pengembangan bioetanol juga menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan hasil pertanian. Dengan adanya industri pengolahan, komoditas pertanian dapat memiliki nilai tambah sebelum masuk ke rantai pemanfaatan sebagai sumber energi.

Namun, pelaksanaan program tetap membutuhkan tahapan yang jelas. Identifikasi lahan, pemeriksaan legalitas, pemetaan komoditas, penghitungan produksi, kesiapan petani, serta dukungan infrastruktur menjadi bagian yang perlu disiapkan oleh setiap daerah.

Pertemuan tersebut sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memahami arah kebijakan pemerintah pusat terkait program bioetanol. Daerah kemudian dapat menyesuaikan langkah persiapan dengan potensi dan kondisi masing-masing wilayah.

Pengembangan bioetanol berbasis tebu, singkong, dan jagung diharapkan tidak hanya mendukung agenda energi nasional, tetapi juga memperkuat sektor pertanian. Jika dikelola dengan perencanaan yang tepat, program tersebut dapat membuka peluang pasar bagi petani sekaligus mendorong pertumbuhan industri pengolahan di daerah.

Bagi Kabupaten Bombana, peluang untuk terlibat dalam program tersebut masih membutuhkan pemetaan dan kajian terhadap potensi wilayah. Pemerintah daerah perlu memastikan komoditas yang akan dikembangkan memiliki dukungan lahan, produksi, petani, dan infrastruktur yang memadai.

Rapat koordinasi di Jakarta tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah pusat untuk membangun koordinasi dengan daerah dalam menyiapkan fondasi pengembangan bioetanol. Selanjutnya, kesiapan masing-masing daerah akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan bentuk pelaksanaan program sesuai potensi wilayah.

Dengan keterlibatan pemerintah daerah sejak tahap awal, pengembangan bioetanol diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Program tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan energi, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan produksi pertanian dan peningkatan nilai ekonomi komoditas lokal.